

SALINAN

NOTARIS

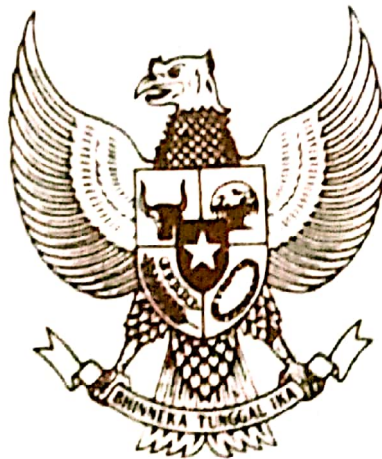
SK. MENKUMHAM RI No: AHU-150.02.01 Th. 2009 Tanggal 03 Februari 2009

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BPN REPUBLIK INDONESIA

No. 109/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 13 April 2011

H. EDY SURIANSYAH, SH, MBA, MKn



KANTOR

**Jl. Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati - Harau Telp/Facs (0752) 7754321-7750199
Kabupaten Limapuluh Kota**

Akta	: TAMAN KANAK-KANAK (TK) “ TUNAS HARAPAN ”
Nomor	: 05 (Lima)
Tanggal	: 17 Maret 2016



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120101863909

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya TK. TUNAS HARAPAN
Alamat Perusahaan	:	Jorong Bukit Talao Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kel. Gunuang Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota, Prop. Sumatera Barat
NPWP	:	75.475.494.3-204.000
Nomor Telepon	:	082384359884
Nomor Fax	:	0
Email	:	tktunasharapangml@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	:	85132
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 30 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.